



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

# **RENCANA KERJA (RENJA)**

---

**TAHUN 2023**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SEMARANG**

## KATA PENGANTAR

Kami mengawali penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini dengan ungkapan syukur ke hadirat Allah SWT dengan harapan agar kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang dapat tercapai dengan baik sesuai rencana yang telah disusun.

Rencana kerja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Semarang. Rencana kerja perangkat daerah merupakan turunan dari dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2021-2026.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang tahun 2023 yang baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang.

Ungaran, 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SEMARANG



**WENNY MAYA KARTIKA, S.H., M.H.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690113 199303 2 005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>10</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 Dan Capaian Renstra PD.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	37
<b>BAB III TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>39</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	39
3.3. Program dan Kegiatan .....	40
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>iii</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Renja yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai acuan bagi pelaksanaan operasional kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang Tahun 2023.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang (Renja BKPSDM) mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RKPD.
- b. Renja BKPSDM Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan juga digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rancangan program dan kegiatan yang akandisusun dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.
- c. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang telah tercapai pada Tahun 2021.

Keterkaitan antara dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat visi, misi dan program perangkat daerah yang merupakan

penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Semarang (RKPD) yang juga merupakan penjabaran dari Rencana strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah secara tahunan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan penyusunan Renja Tahun 2023 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan lembaran Negara Reublik Indonesia No. 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131,
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah



- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 6);
34. Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Semarang. (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 68)

35. Peraturan Bupati Semarang Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.**

Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Semarang Tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di BKPSDM Kabupaten Semarang. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten dengan argumentasi bahwa implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi BKPSDM Kabupaten Semarang pada tahun 2023. Adapun tujuan penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi acuan bagi BKPSDM Kabupaten Semarang dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2023.
- b. Untuk memperoleh suatu dokumen rencana pembangunan tahunan yang berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi guna pencapaian tujuan.
- c. Sebagai acuan dalam penyusunan KUA/PPAS serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang Tahun 2023.
- d. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan daerah Tahun 2023.
- e. Sebagai pedoman bagi para pelaku aktifitas dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya.

## **1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA**

Renja BKPSDM Kabupaten Semarang Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Semarang, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1 Latar Belakang**

Memuat tentang latar belakang penyusunan Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja PD.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum didalam penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Semarang Tahun 2023.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja PD dan tujuan yang diharapkan.

#### **1.4 Sistematika Penyusunan Renja**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen Renja Tahun 2023.

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai :

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 Dan Capaian Renstra PD**

#### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap pencapaian kinerja PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

#### **2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal yang kritis yang terkait dengan pelayanan PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

### BAB III TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai :

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Yaitu penelaah yang menyangkut keterkaitan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Semarang dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Yaitu perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target dan kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Yaitu berisi rekapitulasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang beberapa kriteria pemilihan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif kegiatan.

### BAB V PENUTUP

Berisi mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh Karena itu Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kabupaten Semarang Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Semarang Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam tabel-1 (Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Semarang dan pencapaian Renstra BKPSDM sampai dengan triwulan IV tahun 2021).

Dari Tabel-1 tersebut terlihat bahwa hampir semua Program kerja BKPSDM Kabupaten Semarang pada tahun 2021 terdapat program dan kegiatan yang realisasinya lebih dari 100 persen, sama dengan 100 persen maupun program dan kegiatan yang realisasinya masih dibawah 100 persen, hal ini disebabkan antara lain: 1) Efisiensi anggaran, 2) Perencanaan yang kurang optimal, sehingga anggaran yang dialokasikan tidak dapat terserap secara optimal dan 3) Terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan.

Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan 6 (enam) kegiatan dan 13 (tiga belas) subkegiatan. Sub kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar dapat tercapai dengan baik, hal ini berarti perencanaan Renja 2021 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota BKPSDM Kabupaten Semarang sudah berjalan dengan baik.

## 2) Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah dengan 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, rata-rata realisasi sub kegiatan mencapai 102,80%. Hal ini dikarenakan terdapat 4 (empat) sub kegiatan yang realisasinya lebih dari 100%, seperti sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian sebesar 116,03%, sub kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian sebesar 101,92%, sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN sebesar 112,50% dan sub kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN sebesar 265,79%. Sedangkan untuk sub kegiatan yang realisasinya mencapai 100% terdapat 4 (empat) yaitu sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN dan sub kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN. Terdapat 4 (empat) sub kegiatan yang realisasinya dibawah 100% antara lain sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN, sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dan sub kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai.

## 3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, realisasi sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 85,71%. Sedangkan sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan sebesar 112,24%.

Evaluasi terhadap hasil Renja PD tahun lalu dapat dilihat di Tabel-1  
Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD Kabupaten Semarang : Renja PD BKPSDM,

Periode	Pelaksanaan	Triwulan	IV	Tahun	2021.
---------	-------------	----------	----	-------	-------



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										I		II		III		IV						K	Rp		K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp		K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12		14 = 13/5 x100%		15			
1.5		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																									
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembayaran instruktur senam; Penyediaan makan minum pegawai;	72	589,253,000	72	310,831,000	12	89,825,000	3	12,642,000	3	14,244,000	3	19,562,000	3	28,129,000	12	74,577,000	12	74,577,000	16.67	12.66	BKPSDM			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rakoor dan konsultasi ke DIY/Jateng; Jumlah pelaksanaan rakoor dan konsultasi ke DKI Jakarta; Jumlah pelaksanaan rakoor dan konsultasi ke Jawa Barat; Jumlah pelaksanaan rakoor dan konsultasi ke Luar Jawa; Jumlah pelaksanaan rakoor dan konsultasi ke Semarang;	201	392,678,000	135	575,560,789	16	42,705,000	8	15,945,400	1	740,000	1	2,260,000	5	23,042,655	15	41,988,055	15	41,988,055	7.46	10.69	BKPSDM			
1.6		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																									
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan administrasi surat masuk dan keluar	72	101,115,000	39,362	131,890,000	12	17,281,000	3	5,392,920	3	5,250,600	3	3,149,300	3	1,879,800	12	15,672,620	12	15,672,620	16.67	15.50	BKPSDM			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa kantor air, listrik dan telpon	72	544,600,000	72	388,183,214	12	82,500,000	3	15,240,329	3	18,875,058	3	18,034,062	3	18,812,022	12	70,961,471	12	70,961,471	16.67	13.03	BKPSDM			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	72	257,819,000	72	147,002,000	12	29,856,000	3	2,190,000	3	8,687,500	3	7,931,800	3	9,810,000	12	28,619,300	12	28,619,300	16.67	11.10	BKPSDM			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran honor cleaning service; Pembayaran jasa angkut sampah, restribusi sampah dan alat kebersihan; Pengadaan alat kebersihan kantor;	72	434,620,000	72	256,447,124	14	69,812,000	3	16,268,248	3	20,475,572	3	16,112,472	5	15,398,972	14	68,255,264	14	68,255,264	19.44	15.70	BKPSDM			





No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12	14 = 13/5 x100%											
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan bulanan berupa mekanisme laporan dan pemajanaan data pegawai; Jumlah Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara terdiri dari pejabat negara, pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat fungsional auditor dan P2UPD wajib LHKPN tahun pelaporan 2020; Jumlah validasi dan entry data kepegawaian; Sosialisasi peraturan perundangundangan	68	616,395,000	42,404	421,956,177	8014	32,898,000	3	10,320,060	4	5,267,900	4	1,895,500	3	11,395,500	14	28,878,960	14	28,878,960	20.59	4.69	BKPSDM
2.2		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>																						
		Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya mutasi PNS; Terlaksananya pengangkatan CPNS menjadi PNS;	5,879	143,180,000	3,385	101,656,612	570	16,433,000	22	-	8	5,030,000	0	1,675,000	185	6,081,000	215	12,786,000	215	12,786,000	3.66	8.93	BKPSDM
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terselesainya SK kenaikan pangkat PNS; Terselesainya SPTKG Gol. IV PNS;	12,591	283,796,000	13,492	447,085,853	2450	32,484,000	549	8,085,620	784	8,555,000	619	3,156,500	308	10,239,500	2260	30,036,620	2,260	30,036,620	17.95	10.58	BKPSDM
		Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya pelantikan jabatan struktural Terlaksananya seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi;	27	2,718,870,000	2,153	1,381,412,106	8	484,909,000	1	6,626,500	2	97,480,500	1	6,320,000	5	83,922,500	9	194,349,500	9	194,349,500	12.50	44.72	BKPSDM
2.3		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>																						
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pemberian bantuan pendidikan; Pemberian bantuan wisuda S2;	36	212,756,000	32	232,586,237	3	25,253,000	0	-	0	-	1	14,305,500	1	7,550,500	2	21,856,000	2	21,856,000	5.56	10.27	BKPSDM
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Terselesainya pelantikan pejabat fungsional Terselesainya SK fungsional	1,812	698,401,000	-	-	305	106,788,000	149	7,129,865	187	4,886,000	92	25,489,500	380	45,158,070	808	82,663,435	808	82,663,435	44.59	11.84	BKPSDM

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										I		II		III		IV						K	Rp		K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp		K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12		14=13/5 x100%		15			
2.5		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>																									
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas; Pemberian piagam penghargaan satyalencana; Tereleksikannya SK TPP dan Perbup TPP;	3,129	555,999,000	1,963	741,971,027	432	79,450,000	51	16,689,050	51	11,969,500	0	11,955,000	236	32,344,400	338	72,957,950	338	72,957,950	10.80	13.12	BKPSDM			
		Pembinaan Disiplin ASN	Terlaksananya sidak kepegawaian; Terlaksananya rakor pembahasan hasil monev/ sidak;	2,988	177,589,000	108	61,134,500	11	4,620,000	0		0	-	0	-	11	2,260,000	11	2,260,000	11	2,260,000	0.37	1.27	BKPSDM			
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	Rapat penyelesaian kasus	192	251,150,000	121	204,097,785	26	33,474,000	2	3,112,963	6	3,113,000	7	2,425,000	11	22,862,041	26	31,513,004	26	31,513,004	13.54	12.55	BKPSDM			
3		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA</b>																									
3.1		<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>																									
		1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat teknis atau fungsional sesuai persyaratan	795	1,352,527,000	553	1,133,819,465	70	163,877,000	3	23,117,905	6	24,083,000	39	15,986,000	12	79,228,000	60	142,414,905	60	142,414,905	7.55	10.53	BKPSDM			
3.2		<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>																									

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12		14=13/5 x100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12	14=13/5 x100%	15										
		1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	CPNS mengikuti dan lulus diklat prajabatan/ pelatihan dasar; Evaluasi pasca diklat; Terkirimnya peserta Diklat Kepemimpinan Tk. II, II dan IV; Terkirimnya PNS Gol. II dan III mengikuti ujian dinas dan penyelesaian ijazah; Terlaksananya penerimaan benchmarking ke best practice atau OL Pemkab/ Kota lain atau lembaga diklat daerah lain;	5,420	19,901,026,000	1,325	9,912,858,987	588	3,421,868,000	101	92,578,000	202	2,811,273,330	297	269,287,500	60	46,814,928	660	3,219,953,758	660	3,219,953,758	12.18	16.18	BKPSDM
				41,087	71,061,453,000	108,287	19,288,896,475	14,922	11,319,560,000	1,230	1,183,122,233	1,397	4,431,844,863	1,184	1,671,093,673	2,444	2,666,481,257	6,255	9,952,542,026	114,542	29,241,438,501	278.78	41.15	

Proses penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Semarang tahun 2023 mulai dari tahap penyusunan rancangan awal Renja sampai dengan rancangan akhir melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja BKPSDM sebagai berikut :

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah  
Kabupaten Semarang

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi Renja- Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD.	√			
7.	Perumusan tujuan dan	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	sasaran.				
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran bupati.				
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	prakiraan maju				
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	√			

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Semarang pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel-2.1**  
**KINERJA PELAYANAN PD**

No	Sub Kegiatan	Target DPPA	Realisasi s.d. TW III Th. 2021	Realisasi Fisik (%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	5 dok	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dok	6 dok	100,00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bln	12 bln	100,00
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bln	12 bln	100,00
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9 unit	9 unit	100,00
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bln	12 bln	100,00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 kl	15 kl	93,75
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000 srt	5.400 srt	67,50
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	12 bln	100,00
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bln	12 bln	100,00



11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bln; 2 org	12 bln ; 2 org	100,00
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bln; 1 org	12 bln ; 1 org	100,00
13	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bln; 1 org	12 bln ; 1 org	100,00
14	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	4 buku	4 buku	100,00
15	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.792 SK	1.120 SK	62,50
16	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	25 org; 474 SK	23 org; 556 SK	116,03
17	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 lap; 1 LHKPN; 8000 data; 1 kl sosialisasi	12 lap; 1 LHKPN; 8153 data; 2 kl sosialisasi	101,92
18	Pengelolaan Mutasi ASN	570 SK	215 SK	37,72
19	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1050 SK KP; 1400 SPTKG	1059SK KP; 1201 SPTKG	92,24
20	Pengelolaan Promosi ASN	6 kl pelantikan; 2 kl seleksi JPT	7 kl pelantikan; 2 kl seleksi JPT	112,50
21	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1 org mahasiswa S2; 2 org wisudawan	1 org mahasiswa S2; 1 org wisudawan	66,67
22	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	4 kl pelantikan; 300 SK	5 kl pelantikan; 803 SK	265,79
23	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	280 org pembekalan; 150 org penghargaan; 2 dok TPP	280 org pembekalan; 56 org penghargaan; 2 dok TPP	78,24
24	Pembinaan Disiplin ASN	10 kl sidak; 1 kl rakor	10 kl sidak; 1 kl rakor	100,00
25	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	26 kl	26 kl	100,00
26	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	70 org	60 org	85,71

	Umum			
27	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	495 org latsar; 1 kl evaluasi; 13 org diklatpim Tk. II, III dan IV; 78 org UD dan UKPPI; 1 kl benchmarking	495 org latsar; 1 kl evaluasi; 13 org diklatpim Tk. II, III dan IV; 149 org UD dan UKPPI; 2 kl benchmarking	112,24

Dari 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan didalam tabel-2 diatas terdapat 5 (lima) sub kegiatan yang capaian kinerjanya lebih dari 100%, yaitu :

1. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian pencapaian kinerja 25 orang bantuan uang duka PNS yang meninggal dunia, dan 474 SK pensiun (116,03%) dibandingkan dengan target kinerjanya 25 orang bantuan uang duka PNS yang meninggal dunia, dan 556 SK pensiun. Pencapaian kinerja yang melebihi target yaitu dari SK pensiun karena penyelesaian SK pensiun menyesuaikan dengan permohonan dari PD.
2. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian pencapaian kinerja 12 laporan peremajaan data pegawai, 1 kali pelaporan LHKPN, 8153 validasi data pegawai, 2 kl sosialisasi peraturan perundang-undangan (116,03%) dibandingkan dengan target kinerja 12 laporan peremajaan data pegawai, 1 kali pelaporan LHKPN, 800 validasi data dan entry data kepegawaian, 1 kl sosialisasi peraturan perundang-undangan. Pencapaian kinerja melebihi target karena proses validasi data pegawai menyesuaikan permohonan dari PD dan adanya pelaksanaan sosialisasi terkait dengan penanganan benturan kepentingan sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi.
3. Pengelolaan Promosi ASN pencapaian kinerjanya 7 kali pelantikan dan 2 kali seleksi JPT (112,50%) dibandingkan dengan targetnya 6 kali pelantikan dan 2 kali seleksi JPT. Pencapaian kinerja tersebut karena adanya pelaksanaan

- pelantikan susulan dikarenakan pada saat pelantikan tanggal 1 Oktober 2021 terdapat PNS yang tidak dapat menghadiri karena sedang bertugas di luar kota.
4. Pembinaan jabatan Fungsional ASN pencapaian kinerjanya 5 kali pelantikan, dan 803 SK fungsional (265,79%) dibandingkan dengan targetnya 4 kali pelantikan dan 300 SK Fungsional. Pencapaian kinerja tersebut dikarenakan pada tahun 2021 bersamaan dengan adanya kebijakan inpasing jabatan fungsional dan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.
  5. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan pencapaian kinerjanya 495 orang yang mengikuti latsar, 1 kali evaluasi pasca diklat, 13 orang Diklatpim Tk. II, II dan IV, 149 orang mengikuti Ujian Dinas dan UKPPI serta 2 kali *benchmarking* (112,24%) dibandingkan dengan targetnya 495 orang yang mengikuti latsar, 1 kali evaluasi pasca diklat, 13 orang Diklatpim Tk. II, II dan IV, 78 orang mengikuti Ujian Dinas dan UKPPI serta 1 kali *benchmarking*. Pencapaian kinerja tersebut karena jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas lebih banyak dikarenakan efisiensi dari indeks satuan biaya pengiriman peserta.

Sub kegiatan yang pencapaian kinerjanya 100% terdapat 13 (tiga belas) sub kegiatan, yang terdiri dari :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

7. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
10. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
11. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.
12. Pembinaan Disiplin ASN.
13. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.

Pencapaian kinerja untuk kegiatan tersebut diatas 100% semua hal ini menandakan telah tertibnya pelaporan maupun administrasi keuangan, sarana dan prasarana yang terpenuhi. Sehingga berdampak pada peningkatan disiplin, kompetensi dan profesionalisme Aparatur Pemerintah sehingga responsive menghadapi perubahan-perubahan paradigma pemerintahan.

Sedangkan sub kegiatan yang pencapaian kinerjanya kurang dari 100%, ada sebanyak 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu :

1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD capaian kinerjanya 16 kali pelaksanaan rapat koordinasi (93,75%) dibandingkan dengan targetnya 15 kali pelaksanaan rapat koordinasi. Capaian kinerja yang tidak memenuhi target dikarenakan adanya perubahan tempat pelaksanaan rapat koordinasi sehingga mengurangi target sub kegiatan.
2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat capaian kinerjanya 5400 surat (67,50%) dibandingkan dengan targetnya 8000 surat, hal tersebut dikarenakan terdapat surat masuk maupun surat keluar yang pengirimannya dilakukan melalui aplikasi.

3. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK capaian kerjanya 1.120 SK (62,50%) dibandingkan dengan targetnya 1.792 SK, hal tersebut dikarenakan hasil nilai CPNS dan PPPK Non Guru dari BKN tidak sesuai yang direncanakan/ jadwal mundur, sehingga SK terproses pada bulan Januari 2022, sedangkan untuk PPPK Guru proses seleksi dilaksanakan oleh Kemendikbud, dari Formasi 1.506 Formasi yang lolos seleksi tahap 1 sejumlah 942 orang, dan proses seleksi dilakukan secara bertahap yaitu tahap 1, tahap 2 dan tahap 3, sehingga hasil seleksi juga bertahap, sedangkan untuk PPPK Non Guru dari Formasi 150 terisi 46 formasi dikarenakan dalam seleksi administrasi banyak yang tidak sesuai dengan persyaratan.
4. Pengelolaan Mutasi ASN capaian kerjanya 215 SK (37,72%) dibandingkan dengan targetnya 570 SK, hal tersebut karena proses persetujuan mutasi yang tertunda karena tidak dapat rekomendasi dari pimpinan PD maupun PPK / Bupati dan Pengangkatan CPNS ke PNS 495 orang terealisasi 79 orang, dikarenakan adanya STTPL yang belum terproses, karena STTPL merupakan syarat untuk pengangkatan CPNS menjadi PNS.
5. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN capaian kerjanya 1059 SK KP dan 1201 SPTKG (92,24%) dibandingkan dengan targetnya 1050 SK KP dan 1400 SPTKG, hal tersebut karena SPTKG menyesuaikan usulan dari PD.
6. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN capaian kerjanya 1 orang mahasiswa S2 dan 1 orang wisudawan (66,67%) dibandingkan dengan targetnya 1 orang mahasiswa S2 dan 2 orang wisudawan, hal tersebut karena terdapat 1 orang beralih status menjadi izin belajar per Bulan September 2021
7. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai capaian kerjanya 280 orang pembekalan PNS, 56 orang penghargaan dan 2 dokumen TPP dibandingkan dengan targetnya kerjanya 280 orang pembekalan PNS, 150 orang penghargaan dan 2 dokumen TPP, hal tersebut karena usulan pemberian penghargaan satya lencana hanya disetujui 56 orang.

8. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum capaian kinerjanya 60 orang (85,71%) dibandingkan dengan targetnya 70 orang, hal tersebut karena penyelenggaraan diklat masih terbatas karena kondisi pandemi

### **2.3 ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD.**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Semarang, maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut :

- a. Belum semua pejabat struktural mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatannya.
- b. Usulan formasi dari PD belum semuanya terakomodir oleh Kementerian PAN dan RB, sehingga banyak PD yang kekurangan tenaga khususnya dari tenaga administrasi.
- c. Proses mutasi yang tidak melalui aplikasi, dan tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang akan diduduki.
- d. Belum semua PD meng-*upload* data pendukung untuk persyaratan Kenaikan Pangkat maupun Pensiun, dan sebagian masih mengirim berkas KP / pensiun dan belum lengkap sesuai yang dipersyaratkan. Masih ditemukan PD yang tidak tepat waktu dalam mengirim usulan sesuai surat edaran yang telah ditentukan. Dalam melakukan *upload* dokumen yang telah di *scan*, dokumen tidak jelas / terbaca.
- e. Masih tingginya kebutuhan personil disemua organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Semarang karena kekurangan personil dan banyak Pegawai Negeri Sipil di Perangkat Daerah yang memasuki usia pensiun (BUP).

Pada dasarnya berbagai hambatan dan permasalahan yang ada tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang, NSPK maupun SPM. Namun adanya kekosongan jabatan pimpinan tinggi pada beberapa Perangkat Daerah berdampak pada pencapaian indikator nasional yaitu Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rancangan awal RKPD tahun 2023 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023. Setelah Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka setiap SKPD wajib menyesuaikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana kerja. Bagian ini berisi perbandingan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap rumusan program dan kegiatan yang sesuai dengan rancangan awal RKPD termasuk dalam hal penganggaran. Tahapan rancangan awal RKPD disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel-2.2**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023**  
**KABUPATEN SEMARANG**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			Indeks Merit Sistem	0,60	12.149.246			Indeks Merit Sistem	0,60	11.107.769	
1.	Kepegawaian Daerah	Kab. Semarang	Persentase Peningkatan Disiplin ASN	99,91%	3.340.059	Kepegawaian Daerah	Kab. Semarang	Persentase Peningkatan Disiplin ASN	99,91%	2.577.803	
1.1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Kab. Semarang			2.537.059	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Kab. Semarang			1.819.046	
1.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	4 Dokumen	25.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	4 Dokumen	19.046	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	657 Dokumen	2.232.059	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	657 Dokumen	1.600.000	
1.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	614 Dokumen	100.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	614 Dokumen	60.000	
1.1.4	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	14 Laporan	180.000	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	14 Laporan	140.000	
<b>1.2.</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Kab. Semarang</b>			<b>515,000</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Kab. Semarang</b>			<b>498.965</b>	
1.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan	100 Dokumen	20.000	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan	100 Dokumen	16.747	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			
1.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2040 Dokumen	45.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2040 Dokumen	41.312	
1.2.3	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	40 Dokumen	450.000	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	40 Dokumen	440.906	
<b>1.3.</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Kab. Semarang</b>			<b>133.000</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Kab. Semarang</b>			<b>124.116</b>	
1.3.1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	6 Orang	33.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	6 Orang	32.503	
1.3.2	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	300 Orang	100.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	300 Orang	91.613	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1.4.	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Kab. Semarang</b>			<b>155.000</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Kab. Semarang</b>			<b>135.676</b>	
1.4.1	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	430 Orang	85.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	430 Orang	85.000	
1.4.2	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	441 Orang	30.000	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	441 Orang	23.000	
1.4.3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	32 Laporan	40.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	32 Laporan	27.676	
2.	<b>Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>Kab. Semarang</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>69,68%</b>	<b>3.414.910</b>	<b>Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>Kab. Semarang</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>69,68%</b>	<b>3.286.389</b>	
2.1.	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Kab. Semarang</b>			<b>214.406</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Kab. Semarang</b>			<b>169.843</b>	
2.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan	105 Orang	214.406	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan	105 Orang	169.843	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Kompetensi			Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Kompetensi			
2.2	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Kab. Semarang</b>			<b>3.200.504</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Kab. Semarang</b>			<b>3.116.546</b>	
2.2.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	3.200.504	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	3.116.546	
3.	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kab. Semarang</b>			<b>5.394.277</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kab. Semarang</b>			<b>5.243.604</b>	
3.1.	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan</b>	<b>Kab.</b>			<b>18.500</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan</b>	<b>Kab.</b>			<b>16.927</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Semarang</b>				<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Semarang</b>				
3.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	11.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	9.976	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	7.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	6.951	
<b>3.2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>4.373.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>4.563.857</b>	
3.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang / Bulan	4.350.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang / Bulan	4.541.508	
3.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan		Jumlah Dokumen	12 Dokumen	23.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan		Jumlah Dokumen	12 Dokumen	22.349	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
<b>3.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>10.000</b>					<b>12.365</b>	
3.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	10.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	12.365	
<b>3.4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>50.000</b>	-	-	-	-	-	Kegiatan ditiadakan karena adanya saving anggaran
3.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	40.000	-	-	-	-	-	
3.4.2	Pendataan dan Pengolahan		Jumlah Dokumen Pendataan dan	50 Dokumen	10.000	-	-	-	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Administrasi Kepegawaian		Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
<b>3.5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>402.762</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>260.899</b>	
3.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	230.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	124.260	
3.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	10.000	-		-	-	-	Sub Kegiatan ditiadakan karena adanya saving anggaran
3.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	51 Paket	100.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	51 Paket	89.428	
3.5.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	37 Laporan	67.762	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	37 Laporan	47.211	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			Konsultasi SKPD					Konsultasi SKPD			
3.6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>95.520</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>58.912</b>	
3.6.1	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	14.520	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	26.772	
3.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	81.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	32.140	
3.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				216.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				212.663	
3.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.600	
3.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	89.100	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
3.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	40.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	37.963	
3.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70.000	
<b>3.8.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>228.495</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>117.981</b>	
3.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	82.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	79.981	
3.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	146.495	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	38.000	



## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Semarang sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. Tugas pokok BKPSDM Kabupaten Semarang adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sehingga tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI**

Rencana kerja (Renja) BKPSDM Kabupaten Semarang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Semarang. Oleh karena itu dokumen Renja BKPSDM Kabupaten Semarang dibuat berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Semarang dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang 2021-2026. Sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Semarang bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024, maupun ditingkat Provinsi Jawa Tengah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018-2023.

##### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN PD**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Semarang periode tahun 2021-2026, yaitu :

**BERSATU, BERDAULAT, BERKEPRIBADIAN, SEJAHTERA DAN MANDIRI  
(BERDIKARI), DENGAN SEMANGAT GOTONG-ROYONG BERDASARKAN  
PANCASILA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG  
BER-BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Renja BKPSDM Kabupaten Semarang mendukung pencapaian misi ketiga Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026, yaitu :

**Misi ke3** : Meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan professional.

BKPSDM Kabupaten Semarang sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, serta Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, tata kerja dan perincian tugas Perangkat Daerah Kab.Semarang. Tugas Pokok BKPSDM Kabupaten Semarang adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam rangka menunjang pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka BKPSDM dituntut untuk memperhatikan kinerja aparatur serta kualitas aparatur yang diharapkan.

Untuk mewujudkan keberhasilan pelayanan BKPSDM Kabupaten Semarang, maka tujuan dan sasaran berdasarkan RENSTRA BKPSDM Tahun 2021-2026, yaitu :

- 1) Tujuan : Meningkatkan profesionalisme ASN
- 2) Sasaran :
  - a. Meningkatnya disiplin ASN.
  - b. Meningkatnya Kompetensi ASN

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Proses penyusunan program dan kegiatan pada Renja BKPSDM Tahun 2023 sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga terdapat perbedaan dengan dokumen Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026, hal itu dikarenakan adanya penyesuaian indikator kinerja.

Untuk mewujudkan visi dan misi dan sejalan dengan misi Kabupaten Semarang menciptakan Pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *good governance* yang didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten serta pemanfaatan teknologi informasi, maka rencana kerja program dan kegiatan yang akan dirancang pada Tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dan antara lain sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2023**

No	Program/ Kegiatan	Renja PD		Pagu Anggaran (Rp)
		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	
<b>1.</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			<b>2.577.803.000</b>
<b>1.1</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>			<b>1.819.046.000</b>
1.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	4 Dokumen	19.046.000
1.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	657 Dokumen	1.600.000.000
1.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	614 Dokumen	60.000.000
1.1.4	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	14 Laporan	140.000.000
<b>1.2</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>			<b>498.965.000</b>
1.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	100 Dokumen	16.747.000
1.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2040 Dokumen	41.312.000

No	Program/ Kegiatan	Renja PD		Pagu Anggaran (Rp)
		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	
1.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	40 Dokumen	440.906.000
<b>1.3</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>			<b>124.116.000</b>
1.3.1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	6 Orang	32.503.000
1.3.2	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	300 Orang	91.613.000
<b>1.4</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>			<b>135.676.000</b>
1.4.1	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	430 Orang	85.000.000
1.4.2	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	441 Orang	23.000.000
1.4.3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	32 Laporan	27.676.000
	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			<b>3.286.389.000</b>
<b>2.1</b>	<b>Pengembangan Kompetensi</b>			<b>169.843.000</b>
2.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	105 Orang	169.843.000
<b>2.2.</b>	<b>Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>			<b>3.116.546.000</b>
2.2.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	3.116.546.000

No	Program/ Kegiatan	Renja PD		Pagu Anggaran (Rp)
		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>5.243.604.000</b>
<b>3.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>16.927.000</b>
3.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	9.976.000
3.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	6.951.000
<b>3.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>4.563.857.000</b>
3.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	4.541.508.000
3.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	22.349.000
<b>3.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>12.365.000</b>
3.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	12.365.000
<b>3.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>260.899.000</b>



No	Program/ Kegiatan	Renja PD		Pagu Anggaran (Rp)
		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	
3.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	124.260.000
3.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	51 Paket	89.428.000
3.4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	47.211.000
<b>3.5.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>58.912.000</b>
3.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	26.772.000
3.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	32.140.000
<b>3.6.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>212.663.000</b>
3.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.600.000
3.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	89.100.000
3.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	37.963.000
3.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000
<b>3.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>117.981.000</b>

No	Program/ Kegiatan	Renja PD		Pagu Anggaran (Rp)
		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	
3.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	79.971.000
3.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	14 Unit	38.000.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kabupaten Semarang memperhatikan kriteria sebagai landasan pertimbangan antara lain:

1. Memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari BKPSDM.
2. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi BKPSDM maupun Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Semarang.
3. Memperhatikan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan yang akan datang.

Untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan, ditetapkan rencana program dan kegiatan Tahun 2023 beserta pagu indikatif pendanaannya dari belanja langsung. Secara lebih terperinci uraian program dan kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif rencana kerja Tahun 2023 BKPSDM dapat dilihat di Tabel Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023.

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Semarang  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5																	
5	03							7,821,407,000						8,724,538,000			
5	03	01						5,243,604,000						5,384,277,000			
5	03	01	2.01					16,927,000						18,500,000			
5	03	01	2.01	01				5	9,976,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia	5 dokumen	11,000,000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.01	06				6	6,951,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia	6 dokumen	7,500,000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.02						4,563,857,000						4,373,500,000		
5	03	01	2.02	01				45	4,541,508,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia	45 Orang/bulan	4,350,000,000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.02	03				12	22,349,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia	12 Dokumen	23,500,000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.03						12,365,000						10,000,000		
5	03	01	2.03	02				3	12,365,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia	3 Dokumen	10,000,000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06						260,899,000						288,840,000		
5	03	01	2.06	02				5	124,260,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia	5 Paket	113,840,000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Semarang  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				51 Paket	89,428,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia		51 Paket	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	47,211,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia		30 Laporan	75,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5 03 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>58,912,000</b>							<b>32,450,000</b>	
5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	26,772,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia		12 Unit	21,450,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	32,140,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit	11,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5 03 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>212,663,000</b>							<b>222,000,000</b>	
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15,600,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia		12 Laporan	17,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	89,100,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia		12 Laporan	90,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	37,963,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia		12 Laporan	45,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	70,000,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia		12 Laporan	70,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5 03 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>117,981,000</b>							<b>398,987,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Semarang  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	79,981,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia	13 Unit	85,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	38,000,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia	14 Unit	313,987,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>						<b>2,577,803,000</b>						<b>3,340,261,000</b>		
5 03 02 2.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>						<b>1,819,046,000</b>						<b>2,463,261,000</b>		
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				4 Dokumen	19,046,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia	4 Dokumen	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				657 Dokumen	1,600,000,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia	657 Dokumen	2,223,261,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				614 Dokumen	60,000,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia	614 Dokumen	120,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 02 2.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				14 Laporan	140,000,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia	14 Laporan	90,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 02 2.02	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>						<b>498,965,000</b>						<b>545,000,000</b>		
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				100 Dokumen	16,747,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia	100 Dokumen	25,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2040 Dokumen	41,312,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia	2040 Dokumen	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Semarang  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				40 Dokumen	440,906,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia		40 Dokumen	470,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5 03 02 2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>						<b>124,116,000</b>							<b>157,000,000</b>	
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				6 Orang	32,503,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia		6 Orang	37,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				300 Orang	91,613,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia		300 Orang	120,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5 03 02 2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>						<b>135,676,000</b>							<b>175,000,000</b>	
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				430 Orang	85,000,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia		430 Orang	95,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				441 Orang	23,000,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia		441 Orang	35,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				32 Laporan	27,676,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia		32 Laporan	45,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5 04</b>		<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					<b>3,286,389,000</b>							<b>3,517,357,000</b>	
<b>5 04 02</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>					<b>3,286,389,000</b>							<b>3,517,357,000</b>	
<b>5 04 02 2.01</b>		<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>					<b>169,843,000</b>							<b>261,585,000</b>	
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				105 Orang	169,843,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia		105 Orang	261,585,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5 04 02 2.02</b>		<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>					<b>3,116,546,000</b>							<b>3,255,772,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Semarang  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				4 Laporan	3,116,546,000	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumber daya manusia		4 Laporan	3,255,772,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>TOTAL</b>							<b>11,107,796,000</b>							<b>12,241,895,000</b>	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kabupaten Semarang yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program dan kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Semarang berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) BKPSDM Kabupaten Semarang Tahun 2023 dimaksud sebagai dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan yang sudah dicapai oleh BKPSDM Kabupaten Semarang dengan memperhatikan kesepakatan hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan.

Rencana Kinerja (Renja) BKPSDM Kabupaten Semarang Tahun 2023 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program BKPSDM untuk Tahun 2023.

Demikian Rencana Kinerja (Renja) BKPSDM Kabupaten Semarang Tahun 2023 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang.

Ungaran, 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SEMARANG

**WENNY MAYA KARTIKA, S.H., M.H.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690113 199303 2 005